



**ANALISA HUKUM TERHADAP
SUBSTANSI UNDANG-UNDANG
KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI 2019**

IAWAN LIBRARY
NT UNIVERSITY

5.01
ON
a

Donandi S., S.H., M.H.

Analisa Hukum Terhadap Substansi Undang-Undang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2019



2821.2020



ID : 2821.2020
Subjek : Korupsi

345.01
DON
a

**ANALISA HUKUM TERHADAP SUBSTANSI UNDANG-
UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI 2019**

Sujana Donandi S., S.H., M.H.



President University
2020

**Analisa Hukum Terhadap Substansi Undang-Undang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2019**

oleh Sujana Donandi S

Hak Cipta @2020 pada penulis

President University, Bekasi, Jawa Barat

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi monograf ini dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa ijin tertulis dari penulis.

Sumber Cover: publicdomainpictures.net

ISBN: 978-623-6655-27-6

Daftar Isi

PRAKATA	i
Daftar Isi	iii
Abstract	v
Abstrak	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan.....	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum	4
B. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang	7
C. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	9
BAB III. METODE PEMECAHAN MASALAH	18
A. Jenis Penelitian	18
B. Tipe Penelitian	19
C. Pendekatan Masalah	19
D. Sumber Data	20
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	21
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	41
A. Simpulan	41
B. Saran.....	42
Daftar Pustaka	43
A. Buku.....	43

B. Jurnal	43
C. Peraturan Perundang-Undangan	44
D. Internet	44
LAMPIRAN	45
Biografi Penulis	49

Pengesahan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2019 (UU KPK 2019) telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Pemerintah di satu sisi mendukung adanya pembaharuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), sedangkan, di sisi lain, banyak masyarakat menolak revisi tersebut. Salah satu contoh penolakan adalah ketika ribuan mahasiswa melakukan demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada bulan Desember 2019 guna menyuarakan aspirasi mereka agar DPR membatalkan UU KPK 2019 karena mereka beranggapan UU KPK 2019 memperlemah kedudukan KPK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Indonesian Corruption Watch (ICW) memberikan catatan bahwa setidaknya ada 15 kelemahan dari UU KPK 2019. Penelitian ini akan memberikan analisa terhadap substansi UU KPK 2019 khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap sebagai kelemahan oleh ICW. Analisa ini bertujuan untuk memberikan referensi keilmuan di bidang hukum dalam memandang substansi UU KPK 2019.

Analisa Hukum Terhadap Substansi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2019, oleh Sujana Donandi S.

Hak Cipta ©2020 pada Penulis

President University, Jl. Ki Hajar Dewantara, Rt.2, Rw. 4, Mekarmukti, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi 17530

ISBN 978-623-6655-27-6



**ANALISA HUKUM TERHADAP
SUBSTANSI UNDANG-
UNDANG KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI 2019**

